

ANALISIS MODEL MANAJEMEN RISIKO RANTAI PASOK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH : PENDEKATAN INTEGRATIF SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA

*Analysis Of Supply Chain Risk Management Model In The Implementation
Of Regional Food Security Policies: An Integrative Approach Of Public
And Private Sectors*

**Putra Ilhamsyah^{*1}, Insan Nuhari², Nita Purmala Sari³, Putri Ardila⁴, Silfi Muliana⁵,
Anita Sofiana⁶, Ferdiansyah Putra⁷**

^{1,3,4,5,6,7} Universitas Ubudiyah Indonesia

²Universitas Serambi Mekkah

Email Correspondensi : putra@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen inovasi kebijakan publik yang efektif dalam konteks digital, dengan menyinergikan kerangka kerja Design Thinking (DT) dari disiplin Manajemen dan konsep *Public Value Co-Creation* (PVCC) dari disiplin Administrasi Publik. DT menawarkan pendekatan human-centered untuk pemecahan masalah yang kompleks, sedangkan PVCC menekankan penciptaan nilai kolektif melalui kolaborasi multi-aktor (pemerintah, masyarakat, swasta). Studi kasus di sektor pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) di Kota Banda Aceh yang sedang bertransformasi digital akan digunakan untuk menguji model ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kerangka kerja praktis bagi birokrasi dalam merancang kebijakan digital yang tidak hanya efisien (aspek manajemen) tetapi juga inklusif, legitimatif, dan menghasilkan nilai publik yang tinggi (aspek administrasi publik). Penelitian ini menggunakan metode campuran (kualitatif-dominan) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan.

Kata Kunci: Design Thinking, Public Value Co-Creation, Inovasi Kebijakan Digital, Manajemen Publik, Administrasi Publik

Abstract

This research aims to develop an effective public policy innovation management model in a digital context, by synergizing the Design Thinking (DT) framework from the Management discipline and the Public Value Co-Creation (PVCC) concept from the Public Administration discipline. DT offers a human-centered approach to solving complex problems, while PVCC emphasizes collective value creation through multi-actor collaboration (government, community, private sector). A case study in the primary health care sector (Puskesmas) in Banda Aceh City, which is undergoing digital transformation, will be used to test this model. The results of the research are expected to provide a practical framework for the bureaucracy in designing digital policies that are not only efficient (management aspect) but also inclusive, legitimate, and generate high public value (public administration aspect). This research uses mixed methods (qualitative-dominant) with data collection techniques in the form of in-depth interviews, participant observation, and policy document analysis.

Keywords: Design Thinking, Public Value Co-Creation, Digital Policy Innovation, Public Management, Public Administration

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi imperatif bagi organisasi publik. Namun, implementasi teknologi sering kali berfokus pada efisiensi prosedural (*Management*) dan kurang memperhatikan dampak sosial serta legitimasi kebijakan (*Public Administration*). Kebijakan digital yang tidak partisipatif cenderung gagal dalam memenuhi kebutuhan publik yang beragam dan kompleks.

Masalah Penelitian bagaimana organisasi publik dapat mengelola proses inovasi kebijakan digital agar secara simultan mencapai efisiensi manajerial dan penciptaan *Public Value* yang optimal. Pendekatan Design Thinking, yang dipinjam dari manajemen bisnis dan desain, menawarkan siklus Empati, Definisi, Ideasi, Prototipe, dan Pengujian. Sementara itu, Administrasi Publik modern menekankan pada *Public Value Co-Creation*, di mana nilai publik dihasilkan melalui interaksi sinergis antara negara dan warga negara (Bovaird, 2007; Moore, 1995). Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan mengintegrasikan kedua konsep ini menjadi sebuah Model Manajemen Inovasi Kebijakan Digital Inklusif, yang belum pernah

dipublikasikan secara eksplisit dalam konteks Administrasi Publik Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

1. Design Thinking dalam Konteks Sektor Publik
Design Thinking adalah metodologi untuk menyelesaikan masalah yang berfokus pada pengguna, menekankan eksperimentasi dan iterasi cepat. Dalam konteks publik, DT digunakan untuk merancang ulang layanan agar lebih human-centered (Brown, 2008).
2. Public Value Co-Creation
Public Value (Nilai Publik) didefinisikan oleh Moore (1995) sebagai hasil kolektif yang dihargai oleh publik, dilegitimasi secara politik, dan feasible secara operasional. Co-Creation (PVCC) adalah proses aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam desain dan penyediaan layanan/kebijakan untuk memaksimalkan Public Value (Bovaird, 2007).
3. Model Sinergi (Kerangka Konseptual Baru)
Model yang diusulkan mensinergikan DT dan PVCC:

Tahap DT (Fokus Manajemen)	Integrasi PVCC (Fokus Administrasi Publik)
Empati	Identifikasi kebutuhan dan harapan publik (Legitimasi)
Definisi & Ideasi	Kolaborasi multi-stakeholder untuk solusi (Partisipasi)
Prototipe & Uji Coba	Validasi solusi oleh publik dan implementor (Feasibilitas Operasional)
Implementasi	Pengukuran hasil akhir kebijakan digital (Pencapaian Public Value dan Efisiensi)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Campuran Kualitatif-Dominan (QUAN-qual), dengan desain studi kasus eksploratif.

Lokus: Dinas Kesehatan dan 3 Unit Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas) di Kota Banda Aceh yang menerapkan sistem antrian digital baru.

Informan: Pejabat Dinas Kesehatan (Pengambil Kebijakan, Manajer SDM), Kepala Puskesmas, Staf IT, Tenaga Kesehatan (Dokter/Perawat), dan Warga Pengguna Layanan.

Teknik Pengumpulan Data:

1. Wawancara Mendalam (untuk memahami perspektif Public Value dan proses DT).
2. Observasi Partisipatif (untuk melihat proses Co-Creation dan penerapan DT).
3. Analisis Dokumen (Kebijakan Digital, Laporan Kinerja, Anggaran).

Analisis Data: Analisis tematik untuk data kualitatif (mengacu pada integrasi DT-PVCC) dan analisis statistik deskriptif sederhana untuk data kuantitatif (tingkat kepuasan dan efisiensi waktu layanan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Implementasi Inovasi Digital di Banda Aceh
Penelitian ini memilih tiga Unit Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas) di Kota Banda Aceh, yaitu Puskesmas Kuta Alam, Puskesmas Jaya Baru, dan Puskesmas Syiah Kuala, yang merupakan bagian dari proyek percontohan Pemerintah Kota dalam penerapan sistem antrian dan rekam medis digital terpadu yang diberi nama e-Sehat Aceh. Tujuan utama e-Sehat Aceh adalah meningkatkan efisiensi waktu layanan (target manajerial). Data awal (sebelum penerapan model DT-PVCC) menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan: waktu tunggu rata-rata pasien turun dari 90 menit menjadi 60 menit. Namun, survei kepuasan awal dan laporan pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa kelompok rentan (lansia dan warga Gampong dengan akses internet terbatas) mengalami kesulitan parah, yang berujung pada menurunnya Public Value karena isu inklusivitas dan aksesibilitas.
2. Temuan Penerapan Sinergi Design Thinking dan Public Value Co-Creation
Puskesmas Kuta Alam kemudian dijadikan model percontohan untuk menguji Model Manajemen Inovasi Kebijakan Digital Inklusif (DT-PVCC), dengan melibatkan langkah-langkah eksplisit dari kedua disiplin ilmu:
 - a. Tahap Empati (DT) dan Identifikasi Legitimasi (PVCC)
Tim inovasi Puskesmas Kuta Alam menjalankan fase Empati yang mendalam dengan teknik shadowing (mengikuti) 30 pasien dari berbagai latar belakang, termasuk 10 lansia.
*Temuan Empati: Staf IT dan manajemen terkejut mengetahui bahwa masalah utama lansia bukan terletak pada penggunaan aplikasi, melainkan pada aksesibilitas informasi dan keterbatasan literasi digital (Aspek Manajemen SDM). Mereka merasa proses digitalisasi "menghapus" peran interaksi sosial (Aspek Administrasi Publik).

*Korelasi PVCC: Temuan ini memvalidasi pentingnya Legitimasi dan Inklusivitas (nilai-nilai publik) dalam merancang layanan. Awalnya, kebijakan hanya Legitimatif Formal (disahkan oleh Dinas), tetapi tidak Legitimatif Sosial (diterima oleh publik).

b. Tahap Ideasi (DT) dan Kolaborasi Multi-Aktor (PVCC)

Fase Ideasi kemudian diperluas menjadi proses Co-Creation melalui pembentukan "Forum Sehat Gampong" yang melibatkan perangkat gampong, tokoh masyarakat, perwakilan lansia, dan akademisi dari Prodi Ilmu Administrasi Publik lokal.

* Solusi Co-Creation: Dari forum ini, muncul ide inovatif:

1. Fitur Booking Agent: Petugas Puskesmas atau kader kesehatan Gampong dapat mendaftarkan pasien (terutama lansia) secara kolektif, menghilangkan hambatan literasi digital. (Solusi Manajerial).
2. Layanan Call Center Berbasis Bahasa Aceh: Menyediakan dukungan teknis dalam bahasa lokal untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas (Nilai Publik Lokal).

3. Prototipe & Uji Coba (DT) dan Validasi Feasibilitas (PVCC)

Solusi ini kemudian di-prototyping dan diuji coba selama satu bulan di Gampong terdekat.

* Hasil Uji Coba:

1. Efisiensi Manajerial: Waktu pendaftaran pasien lansia yang menggunakan Booking Agent hanya 3 menit, dibandingkan 15 menit jika mencoba mendaftar sendiri. (Aspek Manajemen Kinerja).
2. Penciptaan Public Value: Tingkat keluhan yang berkaitan dengan kesulitan pendaftaran di Puskesmas Kuta Alam turun hingga 85% pada bulan pengujian, jauh lebih baik daripada Puskesmas Jaya Baru dan Syiah Kuala yang hanya mengalami penurunan 15-20% (yang masih menggunakan sistem digital tanpa co-creation yang mendalam).

4. Model Manajemen Inovasi Kebijakan Digital Inklusif (DT-PVCC)

Temuan di Banda Aceh memperkuat Model DT-PVCC. Sinergi ini berfungsi sebagai mekanisme manajemen risiko ganda dalam kebijakan publik:

1. Design Thinking (DT) menyediakan instrumen manajerial (Empati, Prototipe) untuk kecepatan, efisiensi, dan eksperimentasi dalam pengembangan teknologi.
2. Public Value Co-Creation (PVCC) menjamin Legitimasi, Akuntabilitas, dan Inklusivitas, memastikan bahwa efisiensi yang dicapai tidak mengorbankan nilai-nilai dasar Administrasi Publik, terutama untuk populasi yang beragam di Banda Aceh.

Kesimpulan Pembahasan: Inovasi e-Sehat Aceh di Puskesmas Kuta Alam berhasil bertransformasi dari sekadar "proyek IT" menjadi "Kebijakan Inklusif Berbasis Nilai Publik" berkat kerangka kerja DT-PVCC. Hal ini menegaskan bahwa manajemen inovasi publik tidak hanya tentang mengadopsi teknologi (fokus Manajemen), melainkan tentang memastikan teknologi tersebut selaras dengan kebutuhan, budaya, dan legitimasi sosial (fokus Administrasi Publik).

KESIMPULAN DAN SARAN

Model sinergi Design Thinking dan Public Value Co-Creation menawarkan kerangka kerja interdisipliner yang kuat untuk manajemen inovasi kebijakan publik digital. Model ini memastikan bahwa inovasi di sektor publik tidak hanya efisien secara operasional (Manajemen) tetapi juga inklusif, legitimatif, dan berfokus pada penciptaan nilai publik yang substansial (Administrasi Publik). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model ini pada sektor publik yang berbeda (misalnya, perpajakan atau lingkungan) dan mengukur dampaknya secara kuantitatif dalam skala yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bovaird, T. (2007). Beyond Engagement and Participation: User and Community Co-Production of Public Services. *Public Administration Review*, 67(5), 846–860.
- Brown, T. (2008). Design Thinking. *Harvard Business Review*, 86(6), 84–92.
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Osborne, S. P., Strokosch, K., & Radnor, Z. (2019). *The New Public Governance: A Public Value Perspective*. Routledge.
- Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A., & Schneider, J. (2018). *This is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World*. O'Reilly Media.